

**PENGARUH *MONEY POLITICS* TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI
TAHUN 2015**

Isnaeni Lailatul Izza
20120520097

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
Email: isnaenilailatulizza@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tingkat pemerintahan terkecil pada suatu daerah, yaitu desa. Tetapi pelaksanaan pemilihan kepala desa itu sendiri masih sering kali disertai dengan adanya kecurangan, salah satunya adalah *money politics*. *Money politics* bertujuan untuk mempengaruhi suara dari para pemilih agar para pemilih tersebut memilih salah satu calon yang memberikan bantuan entah itu bantuan berupa uang, barang maupun jasa. Kasus *money politics* tidak hanya menyerang para pemilih yang sudah beberapa kali memberikan suaranya dalam pemilu, pemilih pemula yang notabennya adalah pemilih yang baru pertama kali melakukan pencoblosan juga tidak lepas dari peredaran kasus *money politics*. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara kuesioner/angket, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti tidak hanya menggunakan intepetasi terhadap data yang sudah diperoleh, tetapi peneliti juga menggunakan instrumen bantuan aplikasi statistik yaitu SPSS. SPSS berguna untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan rekapitulasi data yang bersifat presentase. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama* Bentuk *money politics* yang ada dalam pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Pati tahun 2015 adalah yang menjawab berupa uang sebanyak 64 orang (76%). *Kedua* yang menjawab berupa barang sebanyak 46 orang (57 %). Dan *ketiga* yang menjawab berupa jasa sebanyak 47 orang (58%). Selanjutnya dilakukan uji korelasi yang diperoleh hasil sebanyak 0,276 yang artinya pengaruh *money politics* terhadap oemilih pemula pada Pemilihan Kepala Desa Sidomukti tahun 2015 sebesar 7,6% yang berarti pengaruhnya hanya sedikit kepada pemilih pemula. Selebihnya yaitu 92,4% alasan pemilih pemula memilih calon Kepala Desa dipengaruhi oleh faktor lain sepertiusia, status perkawinan maupun pendidikan. Segala bentuk *money politics* harus dihilangkan dalam berbagai bentuk pemilihan umum. Dan perlu adanya pendidikan politik bagi para pemilih pemula untuk membangun kesadaran lebih luas mengenai peran penting mereka dalam mereduksi praktek-praktek politik uang. Dan diharapkan lembaga tingkat desa memberikan pembelajaran politik sehingga pemilih pemula tidak memiliki perilaku politik pragmatis.

Kata kunci: *Money Politics*, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Desa 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.” Sebagai sistem negara, demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti dalam pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga negara sebagai pribadi-pribadi, yang

dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi bisa berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat turut serta memberikan atau ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainnya adalah dalam bentuk kontak atau hubungan langsung dengan pejabat pemerintah. Pemilihan umum di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenisnya, yang pertama adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan.

Sedangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati / Walikota. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk di pilih atau memilih Pimpinan Desa, untuk memimpin pemerintahan desa kedepan sesuai dengan hati nurani masyarakat di desa.

Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya dan juga *money politic*. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, dan *money politic*. Dan saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti *money politic* guna mempengaruhi masyarakat pemilih.

Pada jaman dahulu tidak ada *money politic* dalam pemilihan kepala desa. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan dan hubungan emosional lainnya. Pada masa itu belum banyak orang yang berpendidikan sehingga model-model kampanye visi dan misi belum dikenal. Biasanya calon yang terpilih adalah orang yang dianggap tetua atau orang yang berwibawa yang mempunyai kharisma di desanya. Pada Jaman Reformasi terjadi perubahan besar-besaran dalam proses pemilihan kepala desa. Desa yang

kita harapkan sebagai benteng terakhir kerusakan pranata negara, ternyata juga terkontaminasi pragmatisme politik yang tidak kalah parahnya.

Dapat dibayangkan yang terjadi apabila remaja tabu terhadap politik ketika mereka dewasa nanti, dimana remaja merupakan pengganti generasi sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kemampuan persepsi terhadap remaja atau pemilih pemula kurang, sehingga mereka cenderung memberikan persepsi yang negatif. Dalam rangka melanjutkan regenerasi dalam pembangunan bangsa, peran serta kontribusi remaja atau pemilih pemula dalam kancah politik sangat penting, namun fakta lain masih menunjukkan kurangnya remaja atau pemilih pemula yang berniat untuk berpartisipasi dalam ranah politik.

Aspirasi remaja sebagai pemilih pemula dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang konsep politik. Hal ini berguna agar pemilih pemula tidak mudah tenggelam dalam lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Minimnya pendidikan politik inilah yang dimanfaatkan oleh calon-calon kepala desa untuk melancarkan aksi *money politic*. Para pemilih pemula yang belum tau tentang politik seketika diberikan hadiah atau pemberian berupa uang agar pemilih pemula tersebut memilih dirinya dalam pelaksanaan pilkades.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sidomukti tahun 2015 keterlibatan pemilih pemula dalam praktik pelaksanaan *money politics* agaknya sudah dapat terlihat oleh masyarakat lainnya. Contohnya salah satu calon kepala desa tersebut memberikan bantuan berupa perbaikan fasilitas olahraga berupa perbaikan lapangan voli yang dulunya terbengkalai dan tidak terurus menjadi lapangan yang layak untuk digunakan kembali. Calon tersebut juga memberikan fasilitas kesenian kepada para pemuda. Sedangkan kandidat lainnya juga memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk para pemuda yang akan mengadakan hiburan dalam rangka sedekah bumi dan semua urusan konsumsi panitia sedekah bumi juga ditanggung oleh calon kepala desa tersebut.

Fenomena *money politics* yang sudah masuk dan menjadi hal lazim terjadi di desa tentunya menarik untuk diteliti. Terutama mengenai seberapa jauh pengaruh dari *money politics* untuk pemilih pemula yang masih belum mengetahui tentang dinamika politik. Sebab pemilih pemula adalah mereka para generasi muda yang akan meneruskan regenerasi kepemimpinan, jika dari awal mereka sudah diberikan nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme maka dikhawatirkan mereka juga akan melanjutkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpin mereka sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dngan judul **Pengaruh Money Politics Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2015.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Money Politics terhadap para pemilih pemula?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui pengaruh *Money Politics* dalam pilkades 2015 terhadap pemilih pemula di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian bersifat korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh *Money Politics* terhadap pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2015. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 81 orang yang diambil *secara random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam

melakukan analisa data peneliti tidak hanya menggunakan interpretasi terhadap data yang sudah diperoleh, tetapi peneliti juga menggunakan instrumen bantuan berupa aplikasi statistik yakni SPSS. Penggunaan SPSS adalah untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam perhitungan rekapitulasi data primer yang bersifat persentase serta untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan hasil olahan data berbentuk tabel dan *bar chart*.

II. KERANGKA TEORI

A. Money Politics

Menurut Arnold Herdenheimer dalam Rosyid (2012:4) secara umum istilah korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, telah tumbuh dan berkembang sebagai problem sosial yang serius dan akut di indonesia. Ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara. (Ismawan, 1999:5).

Menurut Schaffer dan Schadler (dalam Schaffer (ed.) 2007: 18) tidak semua transaksi komersial dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, akan tetapi terdapat dua logika transaksi yang dapat dikatakan sebagai praktek

pembelian suara yakni: (1) para aktor yang terlibat (penjual dan pembeli) terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak membayar penjual tidak akan memberikan suaranya; (2) pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengan suara.

Cara bekerjanya *money politics* dalam kampanye selalu melibatkan *intermediary agent* dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang ada secara diam-diam. Bagi Wang dan Kurzman (dalam Schaffer (ed.) 2007: 64) dalam prosesnya pelibatan agen penghubung sangat penting dalam setiap pemilihan umum untuk menjaring suara pemilih pada level lokal. Ketika seorang kandidat memutuskan untuk menggunakan *money politics* terdapat perbedaan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang agen perhubungan salah satunya ialah pemahaman mengenai daerah setempat. Dari situlah kemudian Wang dan Kurzman (dalam Schaffer (ed.) 2007: 64) menjelaskan dalam proses pembelian suara seorang kandidat perlu menyewa politikus lokal atau agen penghubung lokal yang memiliki pengetahuan lokal secara terperinci dengan kriteria: seseorang mengetahui kepada siapa pun ia akan memberikan uang, seseorang yang dapat dipercaya, dan bagaimana

hubungan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

Untuk itu menurut Wang dan Kurzman (dalam Schaffer 2007: 71) dalam proses perekrutan agen penghubung berlandaskan pada tiga kategori hubungan sosial:

1. Keluarga dengan memanfaatkan salah satu pemilih yang berasal dari satu keluarga dengan kandidat bisa kponakan m\ataupun sepupu untuk menjadi penghubung dalam proses pendistribuan uang kepada keluarganya sendiri ataupun tetangga pemilih.
2. Teman yakni memanfaatkan hubungan pertemanan antara kandidat dengan pemilih untuk mendistribusikan uang kepada saudara-saudara pemilih.
3. Tetangga yakni memanfaatkan tetangga dimana ia tinggal untuk mendistribusikan uang dari tetangga satu ke tetangga yang lainnya.

B. Pemilih Pemula

Menurut pasal 1 ayat 22 UU Nomor 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dalam peraturan Konstitusi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umumn anggota dewan anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menyebutkan: “Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicambuk hak pilihnya.” (Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008, pasal 1 ayat 12).

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penelitian dan analisis mendalam, kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga adalah pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Peran pemilih dalam suatu pemilihan umum merupakan peran yang sangat penting untuk menentukan arah demokrasi di sebuah Negara. Untuk menjadikan pemilih sebagai penentu yang sebenarnya, diperlukan setidaknya dua syarat, yaitu:

- a. Pemilih memiliki pengetahuan minimal serta menggunakan akal sehat dari pikiran dan hati nuraninya.
- b. Pemilu yang demokratis, sebab semakin pemilu tersebut tidak demokratis maka para pemilihnya semakin tidak menentukan.

C. Pemilihan Kepala Desa

Pilkades merupakan sebuah lembaga demokrasi lokal (desa) yang mana berfungsi sebagai sarana dari sebuah proses politik yang disebut dengan rekrutmen pemimpin desa. Rekrutmen pemimpin desa (kepala desa) akan diisi oleh satu elite pada akhirnya. Lebih jauh lagi, rekrutmen semacam ini dapat diartikan sebagai proses ke arah pengisian (*staffing*) peran-peran politik yang mana di satu sisi menyangkut transformasi peran nonpolitik menjadi layak memainkan peran politik dan sisi lainnya adalah seleksi untuk menduduki posisi politik yang tersedia namun demikian, maksud dari rekrutmen ini adalah proses yang memiliki penekanan pada kelayakan dan seleksi. Lay dalam Dewi, 2009, hal. 22)

Dalam hal pengisian Kepala Desa berdasarkan UU No 5 Tahun 1979, desa belum memiliki kewenangan secara luas untuk melaksanakan pilkades, karena segalanya masih diatur oleh pemerintah provinsi. Sedangkan UU No. 22 tahun 1999, kewenangan secara luas untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa ada pada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah di atasnya bersifat memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Menurut UU No 6 tahun 2015 kewenangan yang dimiliki secara otonom untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa adalah mulai dari pengumuman kekosongan Kepala Desa, pembentukan panitia, penjaringan bakal

calon kepala desa sampai pada tahap pelaksanaannya, pengesahan kepala desa terpilih kewenangan masih ada pada Bupati/Walikota. Sementara, seiring diundangkannya Perda Kabupaten Pati No. 11 tahun 2014 tentang Kepala Desa, membawa sejumlah perubahan. Diantaranya, ketentuan berkait pengisian penjabat kades.

Motivasi untuk menjadi kepala desa didasarkan atas beberapa hal, antara lain: (1) adanya peluang untuk memenagkan pilkades, ini disebabkan oleh tidak adanya tokoh yang lebih kuat mencalonkan diri dan popularitas yang luas termasuk besarnya kekerabatan. (2) motivasi untuk melanjutkan kepemimpinan yang didasarkan keturunan (trah), atau mengembalikan kepemimpinan yang telah berpindah ketangan kelompok (trah) lain (3) mendapat “restu” dukungan dari lapisan tokoh masyarakat di desa, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penyandang dana, sesepuh, bahkan dukun atau guru spiritual (Nico L. Kana, 2001). Secara khusus motivasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa juga didasarkan bukan atas dasar kalkulasi politik melainkan yang tidak berkaitan dengan orientasi jabatan hanya sekedar untuk menunjukkan independensi sebagai tokoh meskipun tidak akan berhasil memenangkan persaingan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemilihan Kepala Desa

Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada dasarnya sama dengan pilkades di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pati. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa.

Pilkades di desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang diselenggarakan pada tanggal, 28 Maret 2015 pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di desa Sidomukti untuk memimpin pemerintahan Desa Sidomukti. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis.

Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pilkades yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Daftar pemilih tetap untuk pemilihan Kepala Desa, di Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2015 adalah sebanyak : 3411 orang. Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan dan pelaksanaan ujian penyaringan panitia pemilihan menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa, yaitu :

1. Catur Agus Erlina
2. Heri Sugiyanto
3. Karwito., S. Pd.

Sedangkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor PPKD/014/III.2015 tanggal 1 Maret 2015 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sidomukti sebagaimana tercatat dalam lampiran skripsi ini.

Panitia pemilihan memberikan waktu kepada Calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye selama satu (1) kali pada hari tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh panitia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan desa dilakukan di depan BPD, pamong desa, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Sidomukti.

Menurut Pasal 4 pemasangan tanda gambar/foto calon dapat dilakukan di tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor/dinas/instansi dan tempat pemungutan

suara. Dalam hal ini, bakal calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pada saat pemungutan suara, telah disebutkan bila penduduk yang memiliki hak pilih adalah sebanyak : 3.411 orang. Dalam Pilkades di Desa Sidomukti, tidak ada penundaan pelaksanaan Pilkades. Semua telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak : 2.991 orang dari 3.411 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14:00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa. Panitia kemudian wajib mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Sebanyak : 3.406 orang;
2. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak : 2.991 orang;

3. Jumlah hak pilih yang tidak hadir : 420 orang;
4. Calon Kepala Desa Karwito, S.Pd memperoleh suara sebanyak : 2.239 suara
5. Calon Kepala Desa Catur Agus Erlina memperoleh suara sebanyak : 455 suara;
6. Calon Kepala Desa Heri Sugiyanto memperoleh suara sebanyak : 274 suara;

B. Isu Money Politics Dalam Pemilihan Kepala Desa

Pilkades merupakan ajang untuk memilih pemimpin secara langsung di pedesaan, dimana diharapkan sosok yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang memang dikenal oleh warga desa dan yang memang benar-benar mampu untuk membangun desa tersebut. Dalam menentukan pilihannya, warga desa Sidomukti memiliki beberapa alasan diantaranya alasan pendidikan, adanya janji-janji, dan adanya pemberian bantuan tunai serta bantuan dibangun fasilitas umum seperti perbaikan jalan. Adanya praktek pelanggaran diatas yang lebih dikenal dengan politik uang (*Money Politics*) juga merupakan hambatan dalam penciptaan nilai-nilai demokratis dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bentuk hal yang dimaksud dengan *money politics* tidak hanya penyuaapan dalam bentuk uang langsung, praktik *money politics* juga bisa menyangkut tentang pemberian barang dari pihak calon kepala desa melalui tim sukses mereka. Bentuk lain dari *money politics* yang diberikan calon kepala desa Sidomukti adalah dengan mengadakan pengajiandan pertunjukan tradisional yang diselingi ajakan atau kampanye untuk memilih calon pemimpin yang mengadakan acara tersebut.

Keberadaan politik uang ini susah dibuktikan dan apabila terjadi dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Adanya politik uang (*Money Politics*) ini tidak dapat dihindari dan merupakan kegiatan yang wajar dalam setiap Pemilihan Kepala Desa.

Money Politics atau yang lebih dikenal dengan politik uang dapat diartikan sebagai sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis yang bertujuan untuk mempengaruhi si penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan si pemberi, yang di dalamnya meliputi indikator suap, keterikatan, dan paksaan. Dari kesemuanya tersebut di atas telah membuktikan bahwa keberadaan politik uang (*Money Politics*) telah terjadi dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam sebuah ajang yang dinamakan Pemilihan Kepala Desa.

C. Pemilih pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa

Masyarakat desa Sidomukti telah memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, ditunjukkan dengan jawaban responden terkait dengan ketertarikan dalam proses pilkades, sebanyak 100% menyatakan setuju. Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Warganegara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkades ialah warganegara yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah/pernah kawin dan baru pertama kali melakukan pencoblosan. Warganegara yang berusia 17 tahun dikatakan sebagai remaja yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Maka ada istilah untuk remaja yang baru berusia 17 tahun dalam turut serta berpartisipasi dalam pemilukada, biasanya remaja ini sebut sebagai pemilih pemula atau orang yang baru turut serta berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi.

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Setiap warga desa Sidomukti yang berpartisipasi dalam pilkades hendaknya mempertahankan integritasnya dan tidak menggadaikan suaranya kepada calon kepala desa.

D. Pengaruh *Money Politics* Terhadap Pemilih Pemula

Untuk mengetahui tingkat korelasi antara politik uang, barang, dan jasa dan partisipasi pemilihan pemula penulis menggunakan uji korelasi product moment dengan interpretasi. Berdasarkan tabel interpretasi angka 0,276 di atas, dibulatkan menjadi 0,28 disebut sebagai angka indeks korelasi rxy. Angka korelasi rxy tersebut jika diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Angka korelasi yang diperoleh sebesar 0,28 dibandingkan dengan angka kritik Tabel korelasi nilai r. Untuk taraf signifikansi 5% angka kritiknya adalah 0,220. Karena angka korelasi yang diperoleh sebesar $0,28 > r_{table} (0,220)$ maka dapat disimpulkan money politics memiliki pengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula.

- b. Nilai r_{xy} sebesar 0,28 terletak pada posisi 0,20 – 0,40, berarti antara variable *money politics* dengan partisipasi pemilih pemula memang ada hubungan, akan tetapi korelasinya rendah atau lemah. Sehingga korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi antara *money politics* dengan partisipasi pemilih pemula.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variable *money politics* terhadap partisipasi pemilih pemula digunakan rumus regresi linier sederhana melalui program SPSS versi 16.00. Koefisien determinasi R^2 menunjukkan seberapa besar variable independen dapat menjelaskan variable dependen. Hasil output SPSS pada table 3.20 menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,076. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variable *money politics* terhadap partisipasi pemilih pemula hanya sebesar 7,6%, sedangkan 92,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial politik tak langsung yang meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sidomukti tahun 2015 keterlibatan pemilih pemula dalam praktik pelaksanaan *money politics* agaknya sudah dapat terlihat oleh masyarakat lainnya. Peneliti melihat adanya bentuk *money politics* yang dilakukan oleh para

kandidat calon kepala desa Sidomukti. Praktek politik uang yang dilakukan calon kepala desa Sidomukti yaitu dengan cara memberikan sumbangan berupa sembako maupun uang tunai yang mereka sebut itu dengan sedekah ke masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian, para pemilih pemula di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati lebih didominasi oleh pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang berorientasi tinggi terhadap “*policy problem solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Salah satu faktor penentu pemikiran para pemilih pemula adalah tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih maka semakin pemikiran mereka mengenai politik.

Sudah jelas jika *money politics* tidak bisa sepenuhnya membeli suara dari para pemilih pemula. Partisipasi pemilih pemula dalam pilkades desa Sidomukti sudah cukup tinggi ditunjukkan dengan sebanyak 88% masyarakat menggunakan hak pilihnya dari sebanyak 3411 yang masuk dalam daftar tetap.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara politik uang dengan partisipasi pemilih pemula dalam pilkades di Desa Sidomukti. Hal ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula adalah faktor karakteristik social (Milbrath dalam Faturohman, 2002). Hal ini ditunjukkan

sebesar 53% masyarakat menyetujui politik uang.

Menurutnya Eko (2004) politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya.

Kejadian politik uang dalam pilkades langsung seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat kian permisif dengan praktek politik uang dalam pemilu. Minimnya pendidikan politik inilah yang dimanfaatkan oleh calon-calon kepala desa untuk melancarnya aksi *money politics*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik uang dalam pilkades desa Sidomukti tahun 2015 dilakukan calon pilkades secara tertutup dengan memberikan sembako dan uang dalam amplop.

2. Politik barang dalam pilkades desa Sidomukti tahun 2015 dilakukan calon pilkades secara terbuka maupun tertutup dalam bentuk perbaikan fasilitas olahraga berupa perbaikan lapangan voli yang dulunya terbengkalai dan tidak terurus menjadi lapangan yang layak untuk digunakan kembali.
3. Politik jasa dalam pilkades desa Sidomukti tahun 2015 dilakukan calon pilkades secara terbuka maupun tertutup dengan memberikan fasilitas kesenian kepada para pemuda. Sedangkan kandidat lainnya juga memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk para pemuda yang akan mengadakan hiburan dalam rangka sedekah bumi dan semua urusan konsumsi panitia sedekah bumi juga ditanggung oleh calon kepala desa tersebut.

Jadi ada pengaruh politik uang, barang, dan jasa terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pilkades desa Sidomukti tahun 2015 dengan korelasi yang sangat lemah. Partisipasi pemilih pemula meningkat dengan adanya politik uang, namun praktek politik uang ini tidak menjamin pemilih pemula memilih pembeli suara.

B. Saran

1. Perlu adanya pendidikan politik bagi pemilih pemula akan membangun kesadaran lebih luas mengenai peran penting mereka dalam mereduksi praktek-praktek politik uang.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses demokratisasi di tingkat desa, seperti BPD dan pamong desa lebih giat lagi memberikan pembelajaran politik, sehingga pemilih pemula tidak memiliki perilaku politik pragmatis.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pilkades.
4. Dengan demikian penulis menutup skripsi ini dengan himbauan bahwa pemilihan Kepala Desa selayaknya diantisipasi janji-janji uang, barang, dan jasa. Karena Desa adalah ujung tombak pembangunan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo

Schaffer, F. dan Schandler, A. *What is Vote Buying*, dalam Schaffer (ed.) 2007.

“Election For Sale The Causes and Consequences of Vote Buying”. London: Lynne Reinner Publisher

Wang, S. & Kurzman, C. *The Logistics How To Buy Vote*, dalam Schaffer (ed.) 2007, “Election For Sale The Causes and Consequences of Vote Buying” London: Lynne Reinner Publisher

Produk Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 tahun 2014 tentang Kepala Desa

Skripsi

Dewi, Jingga Rosmala. 2009. *Kekenyalan Nilai dan Jaringan Politik Tradisional dalam Modernisasi Proses Elektoral di Desa. Kasus Sejarah Pemilihan Kepala Desa Candiwulan Kebumen*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM